



Pasar Seni Umbulharjo Dikelola BUMD

YOGYAKARTA (SINDO) – Pasar Seni dan Kerajinan yang didirikan di lahan eks Terminal Umbulharjo akan dikelola badan usaha milik daerah (BUMD). Saat ini konsep pengelolaan dan sistem perjalanannya tengah digodok Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Kepala Bappeda Tri Joko Susanto mengatakan, melalui BUMD, dia berharap pengelolaan pasar bisa lebih profesional. Selain bisa mendapatkan keuntungan bagi pendapatan asli daerah (PAD), keberadaan pasar seni ini juga bisa memenuhi target. Target yang dimaksud yaitu mampu menumbuhkan sektor ekonomi di Yogyakarta bagian selatan.

"Berbicara PAD itu jangka panjang. Yang terpenting adalah bagaimana menggerakkan sektor perekonomian dengan menciptakan keramaian-keramaian dan pertumbuhan ekonomi baru," katanya kepada SINDO kemarin.

Menyangkut pendirian BUMD ini, Pemkot akan mengacu pada pola bisnis yang pernah dibahas dengan pihak ketiga pada 2006. Pola

yang disepakati saat itu, Pemkot hanya mengalokasikan anggaran pada awal BUMD berdiri.

"Kalau konsepnya dulu itu, dalam tempo tiga tahun pihak pengelola harus bisa mandiri. Setelah itu, harus bisa mengembalikan modal. Target tahun ke-15 sudah *break event point* (BEP)," ujarnya.

Berdasarkan catatan SINDO, Pasar Seni dan Kerajinan Yogyakarta direncanakan dibangun pada Juni 2006. Saat itu PT Putra Citanusa, investor asal Jakarta, menjadi pemenang tender untuk pembangunan dan pengelolaan pasar tersebut. Saat akan dimulai pembangunan, gempa melanda Kota Yogyakarta dan sekitarnya sehingga rencana pembangunan menjadi terbengkalai.

Ketua Komisi III DPRD Kota Yogyakarta Suhartono tidak mempersoalkan pengelolaan Pasar Seni oleh BUMD. Alasannya, BUMD bisa menjadi jalan tengah ketika pihak ketiga tidak bersedia mengelola proyek investasi ini. "Yang terpenting ke depan tidak terus-terusan membebani APBD," katanya.

(arif budianto)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Wakil Walikota			
3. Bagian Perekonomian Pengemb. P			
4. Bagian Umum			
5. Dinas Pendidikan			
6. Dinas Perhubungan			
7. Dinas Perizinan			
8. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			

